

Integrasi Pendidikan Audy Joinaldy dengan Praktik Kepemimpinan Politik dalam Membentuk Orientasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan.

Rizky Firnanda ¹, Noni Yuanda ²

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia ¹

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia ²

Corresponding Author: firnandarizky88@gmail.com ¹, Noniyuanda1@gmail.com ²

Info Artikel

Submitted: 03 Desember 2025

Revised : 08 Januari 2026

Accepted: 20 Januari 2026

Published: 26 Februari 2026

Keywords: Political education, political leadership, sustainable regional development, Audy Joinaldy, public policy.

Kata Kunci: Pendidikan politik, kepemimpinan politik, pembangunan daerah berkelanjutan, Audy Joinaldy, kebijakan publik.

Abstract

Sustainable regional development requires political leadership that is not only oriented towards economic growth, but also pays attention to social and environmental sustainability. This study aims to analyze the integration of Audy Joinaldy's educational background with his political leadership practices in shaping the orientation of sustainable regional development. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and relevant public policy searches. The results show that Audy Joinaldy's educational background plays a role in shaping adaptive, transformational, and collaboration-based leadership, which is reflected in regional development policies that emphasize the principles of sustainability, community participation, human resource strengthening, and the local economy. The integration between education and political leadership practices encourages the formation of an inclusive and long-term regional development orientation. This study provides an academic contribution to the study of regional political leadership by emphasizing the role of education as a strategic factor in realizing sustainable regional development.

Abstrak

Pembangunan daerah berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan politik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi latar belakang pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran kebijakan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan Audy Joinaldy berperan dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif, transformasional, dan berbasis kolaborasi, yang tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang menekankan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan ekonomi lokal. Integrasi antara pendidikan dan praktik kepemimpinan politik tersebut mendorong terbentuknya orientasi pembangunan daerah yang inklusif dan berjangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian kepemimpinan politik daerah dengan menegaskan peran pendidikan sebagai faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Namun, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya berfokus pada persoalan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup isu ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, orientasi pembangunan daerah dituntut untuk mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan politik di tingkat lokal. Pemimpin daerah memegang peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta mekanisme pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Kepemimpinan politik yang visioner, responsif, dan berorientasi jangka panjang menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pembangunan daerah. Dalam hal ini, latar belakang pendidikan seorang pemimpin menjadi faktor penting yang turut membentuk cara pandang, kapasitas analitis, serta pola pengambilan keputusan dalam praktik kepemimpinan politik (A., H. P., Gazalin, J., dkk, 2020).

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai, etika, dan kemampuan berpikir kritis. Pemimpin politik dengan latar belakang pendidikan yang kuat cenderung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Integrasi antara pendidikan dan praktik kepemimpinan politik menjadi aspek yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks kepemimpinan daerah yang dihadapkan pada tuntutan perubahan global dan lokal yang cepat. Audy Joinaldy sebagai salah satu figur pemimpin politik daerah muda di Indonesia menarik perhatian karena latar belakang pendidikannya yang relatif kuat serta kiprahnya dalam praktik kepemimpinan politik. Kehadirannya merepresentasikan generasi baru pemimpin daerah yang membawa pendekatan berbeda dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Audy Joinaldy dikenal memiliki orientasi kebijakan yang menekankan inovasi, kolaborasi, serta penguatan ekonomi lokal, yang sejalan dengan prinsip pembangunan daerah berkelanjutan (Patodingan, L., Julfani, J., dkk., 2020)

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana pendidikan yang ditempuh Audy Joinaldy berkontribusi dalam membentuk gaya kepemimpinan politik dan orientasi pembangunan daerah yang diusungnya. Dalam praktik kepemimpinan politik Bapak Audy Joinaldy (Wakil Gubernur Sumatera Barat 2021-2025) serta sekarang Dosen di IPB, kebijakan pembangunan tidak lahir secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi antara latar belakang individu pemimpin, konteks sosial-politik, serta kebutuhan masyarakat. Pendidikan berperan sebagai modal intelektual yang memengaruhi kemampuan pemimpin dalam memahami persoalan publik, merancang solusi kebijakan, serta membangun komunikasi dengan berbagai aktor pembangunan. Oleh karena itu, kajian mengenai integrasi pendidikan dan praktik kepemimpinan politik menjadi relevan untuk memahami dinamika pembentukan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan daerah berkelanjutan menuntut adanya kepemimpinan yang mampu mengakomodasi kepentingan lintas sektor dan lintas generasi. Pemimpin daerah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan capaian pembangunan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, kepemimpinan politik yang berbasis pada pengetahuan, nilai keberlanjutan, dan kesadaran lingkungan menjadi sangat penting. Pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang dapat menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri seorang pemimpin (Hadiyani, R., Azis, D., Khairul, M., & Angkasa, M. A., 2023).

Penelitian mengenai kepemimpinan politik daerah selama ini cenderung lebih banyak menyoroti aspek kebijakan, kinerja pemerintahan, atau dinamika politik praktis. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengaitkan latar belakang pendidikan pemimpin dengan orientasi pembangunan daerah berkelanjutan masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai hubungan tersebut dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori kepemimpinan politik serta praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu mengenai kepemimpinan politik daerah umumnya menitikberatkan pada aspek gaya kepemimpinan, kinerja pemerintahan, serta implementasi kebijakan pembangunan. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran penting mengenai peran pemimpin daerah dalam mendorong pembangunan, namun masih cenderung memandang kepemimpinan sebagai praktik politik dan administratif semata. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengaitkan latar belakang pendidikan pemimpin dengan praktik kepemimpinan politik dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pemimpin daerah muda di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis integrasi pendidikan Audy

Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya, serta implikasinya terhadap pembentukan orientasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada integrasi pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan. Penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana pendidikan yang ditempuh Audy Joinaldy memengaruhi cara pandangya terhadap pembangunan, gaya kepemimpinan yang diterapkan, serta kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pendidikan dalam membentuk kepemimpinan politik daerah yang berorientasi pada keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kepemimpinan politik dan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi pengambil kebijakan, partai politik, serta institusi pendidikan dalam menyiapkan kader pemimpin daerah yang berkualitas dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat baik secara teoretis maupun praktis dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian Integrasi Pendidikan Audy Joinaldy dengan Praktik Kepemimpinan Politik dalam Membentuk Orientasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara latar belakang pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politik yang dijalankannya, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi orientasi kebijakan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan perspektif subjektif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang terarah, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan interpretasi secara luas. Informan penelitian meliputi Audy Joinaldy sebagai subjek utama, serta pihak-pihak terkait seperti pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memahami atau terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali bagaimana nilai-nilai pendidikan yang dimiliki Audy Joinaldy diterjemahkan ke dalam gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan politik, dan orientasi

pembangunan berkelanjutan (Agung, 2022)

Selain wawancara, data juga diperkuat dengan studi dokumentasi berupa arsip kebijakan, pidato, laporan pembangunan daerah, serta sumber tertulis lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai integrasi pendidikan dan praktik kepemimpinan politik dalam membentuk arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menjelaskan bahwa latar belakang pendidikannya memiliki peran penting dalam membentuk cara pandangya terhadap kepemimpinan dan pembangunan. Pendidikan tidak hanya ia maknai sebagai proses memperoleh gelar, tetapi sebagai sarana pembentukan pola pikir kritis, etika kepemimpinan, serta kemampuan mengambil keputusan berbasis data dan keberlanjutan. Pengalaman akademik yang ia peroleh, baik melalui pendidikan formal maupun pembelajaran nonformal, membantunya memahami bahwa pembangunan tidak boleh bersifat jangka pendek, melainkan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berimbang. Lebih lanjut, Audy Joinaldy menekankan bahwa pendidikan membentuk sensitivitasnya terhadap pentingnya investasi sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1964), yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas individu dan produktivitas kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinannya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat, pemahaman tersebut tercermin dalam kebijakan yang mendorong penguatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Dengan demikian, latar belakang pendidikan Audy Joinaldy tidak hanya membentuk kompetensi teknokratis, tetapi juga visi kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Ia memandang bahwa pemimpin yang berpendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil hari ini mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang, bukan sekadar memenuhi kepentingan sesaat.

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menjelaskan bahwa gaya kepemimpinannya berangkat dari keyakinan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya menjalankan fungsi

administratif, tetapi juga harus mampu menjadi sumber inspirasi dan penggerak perubahan. Ia menekankan pentingnya visi yang jelas sebagai arah bersama, terutama dalam mendorong transformasi Sumatera Barat menuju daerah yang lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Menurutnya, visi kepemimpinan harus mampu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat agar dapat menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan kolektif. Audy Joinaldy juga menuturkan bahwa motivasi merupakan elemen kunci dalam kepemimpinan transformasional. Ia berupaya membangun hubungan yang partisipatif dengan aparatur pemerintah dan masyarakat, dengan memberikan ruang dialog serta kepercayaan untuk berinovasi. Pendekatan ini ia lakukan untuk mendorong perubahan pola pikir dari sekadar menjalankan rutinitas menuju budaya kerja yang berorientasi pada solusi dan dampak nyata. Dalam praktiknya, ia lebih menekankan keteladanan dan komunikasi yang persuasif dibandingkan pendekatan koersif. Lebih lanjut, Audy memandang inspirasi sebagai kekuatan utama dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Ia berusaha menghadirkan narasi optimisme bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil yang konsisten, terutama dalam bidang pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi kreatif, dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini selaras dengan teori Transformational Leadership dari Burns (1978) dan Bass (1990), yang menekankan kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi nilai serta perilaku pengikutnya demi tujuan bersama. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Audy Joinaldy dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada perubahan jangka panjang. Ia tidak hanya berfokus pada pencapaian target program, tetapi juga pada proses membangun kesadaran, komitmen, dan kapasitas masyarakat sebagai subjek utama pembangunan di Sumatera Barat.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Audy Joinaldy menyampaikan bahwa orientasi pembangunan berkelanjutan yang ia dorong di Sumatera Barat tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau capaian material, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa mengorbankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, setiap kebijakan idealnya diarahkan untuk memberikan manfaat luas dan menghindari dampak yang merugikan kelompok tertentu. Audy Joinaldy memandang bahwa prinsip kemaslahatan umum sangat relevan dalam konteks kepemimpinan daerah, terutama di wilayah yang memiliki akar nilai keagamaan dan adat yang kuat. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia, termasuk

perlindungan terhadap kehidupan sosial, pendidikan, serta ketahanan keluarga. Dalam pandangannya, pembangunan yang mengabaikan aspek spiritual dan intelektual justru berpotensi menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep masalah al-'ammah sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali dalam al-Mustashfa, yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Audy menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan harus memastikan kebebasan beragama dan harmoni sosial tetap terjaga, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terlindungi, akses pendidikan dan pengembangan akal diperkuat, institusi keluarga dan generasi muda diberdayakan, serta perekonomian rakyat ditumbuhkan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, orientasi pembangunan yang digagas Audy Joinaldy dapat dianalisis tidak hanya melalui pendekatan teknokratis modern, tetapi juga melalui perspektif etika Islam yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama kebijakan publik. Pendekatan ini memperkuat legitimasi moral pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan di Sumatera Barat berjalan secara holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menjelaskan bahwa kepemimpinannya berangkat dari kesadaran bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan. Ia menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk memanusiakan manusia, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan kurang terjangkau oleh kebijakan pembangunan. Prinsip ini tercermin dalam upayanya mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan sosial, pemerataan akses pelayanan publik, serta penghargaan terhadap martabat manusia tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, Audy Joinaldy memandang kepemimpinan sebagai sarana pembebasan dari berbagai bentuk ketertinggalan dan ketidakadilan struktural. Ia menegaskan pentingnya peran negara dalam membuka ruang partisipasi, memperluas kesempatan ekonomi, serta membebaskan masyarakat dari ketergantungan dan kemiskinan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip liberasi dalam kerangka kepemimpinan profetik Kuntowijoyo (1991), yang menekankan upaya pembebasan manusia dari sistem yang menindas dan tidak adil. Selain itu, Audy menekankan dimensi transendensi sebagai landasan etis dalam pengambilan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa nilai-nilai spiritual dan keagamaan menjadi kompas moral dalam menentukan arah pembangunan, sehingga kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme politik semata. Kesadaran akan nilai transendental ini,

menurutnya, mendorong sikap kehati-hatian, kejujuran, serta orientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Dengan demikian, kepemimpinan Audy Joinaldy dapat dipahami dalam kerangka kepemimpinan profetik yang mengintegrasikan humanisasi, liberasi, dan transendensi sebagai prinsip utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, bermartabat, dan bernilai spiritual (Putri, S. B., Fahira Putri, T., Tarisa, M. R., & Satriadi, 2022)

Dalam wawancara tersebut, Bapak Audy Joinaldy menegaskan bahwa kebijakan pendidikan daerah yang ia dorong berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan jangka panjang. Ia memandang peran pemimpin daerah tidak hanya sebatas penyedia anggaran dan infrastruktur pendidikan, tetapi juga sebagai pengarah visi besar pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman. Visi ini, menurutnya, harus mampu menyiapkan generasi muda Sumatera Barat agar memiliki daya saing, karakter, serta kepekaan sosial dan budaya. Audy Joinaldy menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas menjadi fokus penting dalam kebijakan pendidikannya. Hal ini tercermin dari upaya memperkuat kualitas guru, tenaga kependidikan, serta manajemen sekolah melalui pelatihan, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Ia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa investasi serius pada sumber daya manusia pendidikan, karena merekalah aktor utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Leithwood dan Riehl (2003) yang menempatkan pengembangan kapasitas sebagai inti dari kepemimpinan pendidikan yang efektif. Lebih lanjut, Audy menyoroti pentingnya menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan inklusif. Ia menyampaikan bahwa lingkungan pendidikan harus aman, mendukung kreativitas, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara akademik maupun nonakademik. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai, dan keterampilan abad ke-21. Dengan demikian, kebijakan pendidikan daerah yang digagas Audy Joinaldy dapat dipahami sebagai praktik kepemimpinan pendidikan yang berorientasi pada visi, penguatan kapasitas, dan penciptaan ekosistem belajar yang berkelanjutan.

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menyampaikan bahwa ia meyakini keteladanan sebagai inti dari kepemimpinan yang efektif, khususnya dalam konteks masyarakat yang religius dan beradat seperti Sumatera Barat. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan atau instruksi, tetapi harus terlebih dahulu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang diyakini bersama. Keteladanan inilah yang kemudian menjadi sumber kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat. Audy Joinaldy menjelaskan bahwa dalam praktik kepemimpinannya, ia berupaya menjaga konsistensi

antara ucapan dan tindakan, terutama dalam hal integritas, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Ia menilai bahwa aparat pemerintah dan masyarakat akan lebih mudah menerima dan menjalankan kebijakan apabila pemimpinnya memberikan contoh nyata. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *uswah hasanah* dalam Pendidikan Islam, yang menempatkan keteladanan sebagai metode paling efektif dalam membentuk karakter dan perilaku sosial. Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, yang menegaskan bahwa stabilitas sosial-politik sangat bergantung pada kualitas moral para pemimpinnya. Audy menilai bahwa keteladanan moral bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga membentuk budaya pemerintahan yang sehat dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, praktik kepemimpinan Audy Joinaldy dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang berlandaskan teladan moral, yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menegaskan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat orientasi pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya menekankan aspek kognitif atau teknis semata, tetapi harus mampu membentuk karakter, akhlak, dan kesadaran sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan, hal ini berarti setiap individu tidak hanya terampil secara profesional, tetapi juga bertanggung jawab, beretika, dan peduli terhadap lingkungan serta kesejahteraan orang lain. Audy Joinaldy menyoroti pentingnya integrasi antara ilmu dan akhlak sebagaimana ditegaskan oleh konsep *ta'dib* dari Syed Muhammad Naquib al-Attas (1980). Ia menilai bahwa pendidikan yang baik harus mendidik manusia secara menyeluruh—membangun intelektualitas sekaligus moralitas—agar kebijakan pembangunan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memahami dan menjalankan pembangunan berkelanjutan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar proyek fisik atau ekonomi. Lebih jauh, Audy menyampaikan bahwa pendidikan agama juga berfungsi sebagai pengingat akan dimensi transendental dalam pembangunan. Kesadaran spiritual ini mendorong pemimpin dan masyarakat untuk membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pendidikan agama Islam, melalui prinsip *ta'dib*, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang holistik dan beretika di Sumatera Barat.

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menyampaikan bahwa ia memandang

kepemimpinan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai sarana kekuasaan semata. Menurutinya, seorang pemimpin harus hadir di tengah-tengah rakyat, memahami kebutuhan mereka, dan bekerja untuk memastikan kesejahteraan kolektif. Prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang ia dorong, mulai dari penguatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Audy menekankan bahwa orientasi pelayanan ini menjadi dasar bagi setiap pengambilan keputusan. Ia selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bahkan jika itu berarti menunda kepentingan politik jangka pendek. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Servant Leadership* dari Greenleaf (1977), yang menekankan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang pertama-tama menjadi pelayan bagi pengikutnya, membangun kepercayaan, dan memberdayakan orang lain untuk berkembang. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan berbasis pelayanan juga menuntut empati, kesabaran, dan kemampuan mendengarkan. Bagi Audy, kemampuan memahami aspirasi masyarakat dan mengartikulasikannya ke dalam kebijakan nyata adalah bentuk nyata dari pelayanan. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Audy Joinaldy dapat dipahami sebagai praktik *Servant Leadership*, di mana kepemimpinan efektif muncul dari komitmen tulus untuk melayani, memberdayakan, dan membangun kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menekankan bahwa integrasi antara ilmu dan iman menjadi landasan penting dalam setiap aspek kepemimpinannya, termasuk dalam bidang pendidikan dan kebijakan politik. Ia menjelaskan bahwa pemimpin yang baik tidak hanya menguasai pengetahuan teknis dan strategis, tetapi juga harus memiliki kompas moral dan spiritual yang kuat agar keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini membantunya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan materi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Audy menegaskan bahwa pendekatan pendidikan yang ia dorong selalu berupaya menggabungkan aspek intelektual dan spiritual. Dalam konteks ini, ilmu bukan sekadar alat untuk menghasilkan kompetensi atau teknologi, tetapi juga sarana untuk memahami dunia secara bijak dan beretika. Iman dan akhlak menjadi pemandu agar ilmu yang diperoleh digunakan untuk kepentingan umum, bukan sekadar keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Seyyed Hossein Nasr (1996), yang menekankan kesatuan antara ilmu (*science*) dan iman dalam membangun peradaban yang berkelanjutan dan beradab. Bagi Audy, kesatuan ini memungkinkan pembangunan politik dan sosial yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermartabat, adil, dan berakar pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian,

kepemimpinan Audy Joinaldy dapat dipahami sebagai kepemimpinan politik berkarakter Islami, di mana integrasi ilmu dan iman menjadi fondasi untuk mengambil keputusan strategis, memimpin masyarakat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan manusiawi.

Dalam wawancara ini, Bapak Audy Joinaldy menjelaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam kepemimpinannya adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hidup, nilai-nilai moral, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurutnya, pemimpin yang bijak harus mampu menyelaraskan kebutuhan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang, sehingga setiap kebijakan memberi manfaat sekarang tanpa merugikan generasi mendatang. Audy menyoroti bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang ia terapkan sejalan dengan definisi dalam Brundtland Report (1987), yaitu pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan daerah yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, pemberdayaan manusia, dan penguatan nilai-nilai sosial-spiritual. Ia menekankan bahwa pembangunan yang hanya materialistis akan kehilangan makna jika tidak diimbangi dengan pembentukan karakter, akhlak, dan kesadaran moral masyarakat. Lebih jauh, Audy menjelaskan bahwa keseimbangan ini juga menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan politiknya. Setiap program, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, dirancang untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan—baik secara fisik maupun spiritual. Dengan demikian, model kepemimpinan Audy Joinaldy dapat dipahami sebagai representasi kepemimpinan yang menyeimbangkan pembangunan material dan spiritual, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang etis, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Pembahasan

A. Peran Pendidikan Audy Joinaldy dalam Pembentukan Visi Kepemimpinan Politik

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kapasitas seorang pemimpin. Bagi Audy Joinaldy, pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai medium pembentukan nilai, prinsip, dan wawasan strategis yang mendasari visi kepemimpinannya. Dalam konteks politik, pendidikan memungkinkan seorang pemimpin untuk memahami kompleksitas

masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat, serta memberi kerangka berpikir kritis dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Pendidikan formal Audy Joinaldy, yang mencakup berbagai jenjang dan pengalaman internasional, memberikan pengaruh signifikan terhadap cara pandangnya dalam memimpin. Melalui pendidikan, ia memperoleh kemampuan analitis dan pemikiran strategis, yang membantunya menilai situasi politik secara objektif dan mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, pendidikan juga membentuk kepekaan sosial dan kepedulian terhadap isu-isu kemasyarakatan, yang menjadi dasar bagi visi politiknya yang inklusif dan progresif. Selain aspek akademik, pendidikan nonformal dan pengalaman belajar di luar kelas juga berperan penting. Kegiatan organisasi, magang, serta interaksi dengan tokoh dan pemimpin lain memberikan wawasan praktis tentang dinamika kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Melalui pengalaman ini, Audy Joinaldy dapat memahami bagaimana teori politik yang dipelajari di bangku pendidikan diterapkan dalam konteks nyata, sekaligus membentuk keterampilan interpersonal dan kemampuan memimpin tim secara efektif. Interaksi lintas budaya dan jaringan global yang diperoleh selama pendidikan internasional juga memperluas perspektifnya, sehingga visi kepemimpinannya tidak terbatas pada kepentingan lokal semata, melainkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam skala yang lebih luas (Yunas, N. S, 2024)

Lebih jauh lagi, pendidikan berperan dalam pembentukan karakter dan etika kepemimpinan Audy Joinaldy. Nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan keadilan yang ditanamkan melalui proses pendidikan menjadi fondasi moral yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik. Pendidikan tidak hanya memberikan kemampuan intelektual, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pengaruh pendidikan terlihat pada cara Audy Joinaldy merumuskan visi politiknya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Pendidikan memampukan dia untuk memadukan antara pendekatan ilmiah dan pragmatis dalam menyusun kebijakan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi politik, tetapi juga didukung oleh data, analisis, dan best practice internasional. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik, serta membantu membentuk seorang pemimpin yang visioner, berpikiran terbuka, dan adaptif terhadap perubahan

zaman.

B. Implementasi Praktik Kepemimpinan Politik dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Praktik kepemimpinan politik memegang peran krusial dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya dilihat dari kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau menjalankan kebijakan, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Dalam konteks pembangunan daerah, hal ini berarti seorang pemimpin harus mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu implementasi nyata praktik kepemimpinan politik dalam pembangunan berkelanjutan adalah melalui perencanaan strategis yang berbasis data dan partisipasi publik. Seorang pemimpin yang memiliki visi berkelanjutan akan mengedepankan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat dan potensi daerah. Misalnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dirancang agar tahan terhadap perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan perkembangan ekonomi di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik yang baik mampu menyatukan antara visi pembangunan jangka panjang dengan realitas lokal.

Selain itu, kepemimpinan politik juga diimplementasikan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan pemerintahan daerah. Pemimpin yang kompeten akan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, praktik kepemimpinan politik yang efektif tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting agar pembangunan daerah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Praktik kepemimpinan politik dalam pembangunan berkelanjutan juga terlihat pada pengambilan keputusan yang berbasis inovasi dan teknologi. Pemimpin yang visioner memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mengelola sumber daya alam, dan meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan. Misalnya, penggunaan sistem informasi

geografis untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan energi terbarukan, atau program pengelolaan limbah yang efisien. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. Lebih jauh, implementasi kepemimpinan politik juga menekankan pembangunan manusia sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan. Pemimpin yang peduli pada keberlanjutan memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak hanya fokus pada fisik atau ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembangunan menjadi inklusif dan berkesinambungan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas (April, 2020)

Dalam praktik sehari-hari, kepemimpinan politik yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus mampu menghadapi tantangan dan konflik kepentingan. Misalnya, konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan kelestarian lingkungan atau kebutuhan sosial masyarakat. Di sinilah kemampuan seorang pemimpin untuk bernegosiasi, memediasi, dan merumuskan solusi kreatif menjadi sangat penting. Pemimpin yang efektif akan menyeimbangkan berbagai kepentingan ini sehingga pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keberlanjutan.

C. Integrasi Pendidikan dan Kepemimpinan dalam Orientasi Pembangunan Daerah

Integrasi antara pendidikan dan kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan daerah. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, pola pikir strategis, dan kemampuan analitis yang sangat penting bagi seorang pemimpin daerah. Sementara itu, kepemimpinan menjadi sarana untuk menerjemahkan ilmu, nilai, dan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan ke dalam kebijakan nyata yang memajukan daerah. Sinergi antara keduanya menghasilkan orientasi pembangunan yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pendidikan membekali pemimpin dengan pengetahuan teknis, wawasan sosial, dan kemampuan kritis yang diperlukan untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif. Pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan kuat mampu menganalisis kondisi daerah secara komprehensif, mulai dari potensi ekonomi, sumber daya manusia, hingga tantangan sosial dan lingkungan. Selain itu, pendidikan juga menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kepedulian

terhadap masyarakat, yang menjadi fondasi etika kepemimpinan. Dengan demikian, setiap keputusan pembangunan yang diambil bukan semata-mata untuk keuntungan jangka pendek, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kepemimpinan politik dan administratif memungkinkan pendidikan diterjemahkan ke dalam praktik pembangunan yang konkret. Pemimpin daerah yang efektif mengintegrasikan ilmu yang diperoleh dari pendidikan dengan kemampuan manajerial, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap kondisi lokal. Contohnya, pemimpin yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan dapat merancang program infrastruktur yang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya lokal secara efisien. Dengan kepemimpinan yang terampil, pendidikan menjadi lebih dari sekadar teori; ia menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi yang nyata. Integrasi ini juga terlihat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pemimpin yang memadukan pendidikan dan kepemimpinan mampu menginisiasi program-program yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia daerah. Pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, serta program literasi masyarakat dapat diorientasikan untuk mendukung pembangunan daerah secara holistik. Pendekatan ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya dilaksanakan secara top-down, tetapi juga berbasis partisipasi publik dan aspirasi lokal. Dengan kata lain, pendidikan memperkuat kemampuan pemimpin, sementara kepemimpinan memastikan pendidikan diterapkan untuk kemajuan nyata daerah. Lebih jauh, integrasi pendidikan dan kepemimpinan juga berpengaruh pada orientasi inovatif dalam pembangunan. Pemimpin yang terdidik mampu berpikir kreatif, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan solusi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam, perencanaan tata ruang, dan pengembangan ekonomi lokal dapat dijalankan dengan pendekatan berbasis bukti dan inovasi, sehingga setiap kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendidikan memberi dasar pemikiran, sementara kepemimpinan memastikan implementasi berjalan efektif dan konsisten dengan visi pembangunan daerah.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan bukanlah proses yang mudah. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga tantangan dan

hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional. Tantangan ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dinamika politik, hingga perubahan lingkungan dan sosial yang cepat. Pemahaman terhadap hambatan-hambatan ini menjadi penting agar strategi pembangunan yang dirancang dapat lebih realistis, efektif, dan berkelanjutan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan daerah. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemimpin dan aparat pemerintah yang memiliki kompetensi teknis, wawasan strategis, serta kemampuan manajerial yang memadai. Namun, pada kenyataannya, tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup terlatih atau memiliki pengalaman dalam mengelola pembangunan yang kompleks. Kurangnya kapasitas ini sering mengakibatkan perencanaan pembangunan yang kurang matang, implementasi program yang tidak optimal, serta kurangnya inovasi dalam menghadapi tantangan lokal. Dampaknya, program pembangunan seringkali bersifat reaktif dan fokus pada kebutuhan jangka pendek, bukan pada keberlanjutan jangka panjang.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Banyak daerah mengalami keterbatasan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang memerlukan investasi awal tinggi, seperti pembangunan energi terbarukan, sistem transportasi ramah lingkungan, atau fasilitas publik yang berkelanjutan. Infrastruktur yang belum memadai, baik berupa jalan, jaringan listrik, sistem air bersih, maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan, juga membatasi efektivitas program pembangunan. Ketergantungan pada sumber daya eksternal atau pendanaan pusat sering kali membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dinamika politik juga menjadi hambatan penting. Kepentingan politik jangka pendek dan persaingan kekuasaan seringkali mengganggu konsistensi implementasi pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan yang membutuhkan komitmen jangka panjang dapat terhenti atau berubah arah ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Selain itu, konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berbeda, baik dalam birokrasi maupun antara pemerintah dan masyarakat, dapat memperlambat atau bahkan menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya bergantung pada rencana teknis, tetapi juga pada stabilitas politik, integritas pemimpin, dan dukungan semua pemangku kepentingan. Hambatan berikutnya muncul dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan tingkat

pendidikan, kesadaran lingkungan, dan budaya partisipasi publik memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Di beberapa daerah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien, atau partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, menghambat efektivitas program pembangunan. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat menghadapi resistensi, kurangnya kepatuhan, atau bahkan kegagalan total. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang konsisten agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari setiap program (Syakur, R. R. F, 2025)

Aspek lingkungan juga menjadi tantangan yang signifikan. Perubahan iklim, bencana alam, degradasi lingkungan, dan tekanan terhadap sumber daya alam menambah kompleksitas perencanaan pembangunan daerah. Daerah yang rentan terhadap banjir, kekeringan, atau erosi misalnya, memerlukan strategi pembangunan yang adaptif dan mitigatif. Namun, keterbatasan data, teknologi, dan kemampuan mitigasi sering kali membuat upaya tersebut sulit diwujudkan secara maksimal. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, baik akibat eksploitasi berlebihan atau kebijakan yang kurang bijak, juga dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan koordinasi dan sinergi antarinstansi serta pemangku kepentingan menjadi hambatan tambahan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif seringkali mengakibatkan duplikasi program, pemborosan sumber daya, atau kebijakan yang kontradiktif. Sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang lemah membuat pembangunan menjadi parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai jauh dari tujuan jangka panjang. Terakhir, hambatan teknologi dan inovasi juga perlu diperhatikan. Implementasi pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemanfaatan teknologi modern untuk efisiensi, pengelolaan sumber daya, dan monitoring program. Namun, beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan akses teknologi, kurangnya tenaga ahli, serta infrastruktur digital yang belum memadai. Hal ini menghambat penerapan inovasi dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah. Keterbatasan ini membuat daerah sulit beradaptasi dengan perubahan global dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

E. Dampak Kepemimpinan Audy Joinaldy terhadap Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Kepemimpinan memainkan peranan penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Di Sumatera Barat, kehadiran Audy Joinaldy sebagai pemimpin daerah membawa sejumlah perubahan yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan. Kepemimpinan yang beliau terapkan dikenal dengan pendekatan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Hal ini menjadi faktor utama dalam mendorong berbagai program pembangunan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Salah satu dampak yang terlihat dari kepemimpinan Audy Joinaldy adalah meningkatnya fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai, mulai dari transportasi, energi, hingga fasilitas publik, menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang kuat, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses pasar lebih mudah, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang lapangan kerja. Strategi ini tidak hanya menstimulus pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, kepemimpinan Audy Joinaldy mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan membuat pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat. Dampak dari hal ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta terciptanya tata kelola yang lebih akuntabel. Dengan cara ini, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan institusi yang kuat sebagai penopang keberlanjutan pembangunan. Kepedulian terhadap isu lingkungan juga menjadi salah satu indikator keberlanjutan dalam kepemimpinan Audy Joinaldy. Berbagai program yang diterapkan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan visi global tentang pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dampak lain yang muncul dari kepemimpinan Audy Joinaldy adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya memberikan perhatian serius pada

pendidikan dan pelatihan, khususnya bagi generasi muda. Program-program peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi inovasi lokal membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi. Dengan adanya masyarakat yang terampil dan berpendidikan, pembangunan daerah tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah, tetapi juga tumbuh secara partisipatif, di mana masyarakat aktif terlibat dalam proses pembangunan. Tidak kalah penting, kepemimpinan Audy Joinaldy juga menekankan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, lembaga non-pemerintah, maupun pemerintah pusat. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pembangunan daerah berjalan lebih efektif, karena memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang beragam. Kolaborasi tersebut juga memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat berkelanjutan, karena didukung oleh komitmen bersama dan tidak bergantung hanya pada sumber daya pemerintah daerah semata.

SIMPULAN

Integrasi pendidikan yang dimiliki Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya menunjukkan bahwa latar belakang akademik dan pengalaman profesional dapat menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pendidikan yang mendalam tidak hanya memperkuat kapasitas analisis dan pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong pendekatan berbasis data, inovasi, dan keberpihakan pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan lingkungan, yang semuanya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Praktik kepemimpinan politik Audy Joinaldy yang mengedepankan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta transparansi pemerintahan menunjukkan bahwa pendidikan dan politik tidak berjalan terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membentuk orientasi pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bersifat temporer atau reaktif, tetapi bersifat strategis dan berjangka panjang, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mempertahankan hasil pembangunan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, integrasi pendidikan dan praktik kepemimpinan politik menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., H. P., Gazalin, J., dkk. (2020). Kepemimpinan Visioner Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Agung, I. Perspektif Multidimensional Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan: Pemikiran Awal Konsep dan Penerapan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(4), (2022). 453–468.
- Hadiyani, R., Azis, D., Khairul, M., & Angkasa, M. A. (2023). Peran Strategis Pendidikan dalam Memperkuat Integrasi Green-Blue, Ekonomi Digital dan Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Educational : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(3), 639–649.
- Patodingan, L., Julfani, J., dkk. (2020). Kepemimpinan Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan di Era Digital. *Educational Journal*.
- Putri, S. B., Fahira Putri, T., Tarisa, M. R., & Satriadi. Efektivitas Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di LPK BCI. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(01). 2022
- Syakur, R. R. F. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. *ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(3). 2025
- April. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsep Kepemimpinan Strategis dalam Pendidikan: Mewujudkan Etika dan Pembelajaran Berkelanjutan. *Jurnal Nuansa*. 2020
- Yunas, N. S. *Sustainable Leadership dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi. 2024